

Partisipasi Politik Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Kepada Perangkat Desa Se Kabupaten Boyolali

Farco Siswiyanto Raharjo^{1*}, Riska Wirawan², Agung Yudhistira Nugroho³

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

*Email : farco.siswiyanto@unisri.ac.id

Article History:

Received: 23 November 2024

Revised: 29 November 2024

Accepted: 30 November 2024

Keywords: *Partisipasi Politik, Perangkat Desa, Pemerintah Desa.*

Abstract: *Progam sosialisasi 4 pilar kebangsaan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Salah satunya adalah kepada perangkat desa, mengingat perangkat desa berinteraksi langsung kepada masyarakat desa setiap hari. Beragam dinamika terjadi ditengah masyarakat. Perlu pemahaman Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Perangkat desa menggunakan instrumen 4 pilar kebangsaan untuk menjalankan tugas pembinaan kerukunan masyarakat desa.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar didunia memiliki karakteristik kehidupan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat di Indonesia dibuktikan dengan banyaknya suku, Bahasa daerah, keragaman budaya dan adat istiadat, hingga agama atau kepercayaan yang di anut oleh masyarakat. Menurut Prof.Dr Jimly Asshiddiqie, masyarakat Indonesia memiliki pola fragmentasi didasarkan pada kemajemukan suku, agama dan geografis, berbeda dengan masyarakat di negara lain misalnya Amerika Serikat dan Australia. Masyarakat Indonesia yang berbeda suku, agama, bahasa dan budaya terpisahkan secara geografis. Misalnya suku batak Toba yang mayoritas Kristiani mendiami Tapanuli Utara dan sekitarnya, sementara Batak Mandailing/Sipirok yang mayoritas Islam mendiami Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Demikian juga suku-suku di Sulawesi Utara mayoritas Kristiani, sementara suku-suku di Sulawesi Selatan mayoritas beragama Islam. Secara natural, masyarakat Indonesia kurang berbaur.

Keberagaman atau kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia, mendorong mekanisme pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang terintegrasi dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Keberadaan pemerintah desa sangat krusial dalam tatakelola pemerintahan. Selain mayoritas wilayah Indonesia terdiri atas pedesaan, selanjutnya pemerintah desa menjadi ujung tombak yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setiap hari.

Salah satu unsur yang terlibat dalam tatakelola pemerintah desa adalah perangkat desa. Keberadaan perangkat desa sebagai diantaranya adalah pembinaan wilayah desa. Maka dengan adanya pembinaan wilayah desa, diperlukan pengetahuan lebih dalam tentang kemajemukan yang ada pada desa. Peningkatan wawasan dan kapasitas tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pelatihan dan sosialisasi. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan didahului mengajukan usulan kepada anggota DPR RI daerah pemilihan setempat. Kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dalam hal ini diprakasai oleh Persatuan

Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali dengan difasilitasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Menghadapi tantangan baik yang berasal dari dalam (radikalisme) maupun luar (pengaruh globalisasi dan teknologi informasi) sudah menjadi keharusan bangsa Indonesia meningkatkan sikap nasionalisme dan wawasan kebangsaannya. Menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah suatu keinginan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara. Dengan adanya persatuan ini maka kondisi negara akan menjadi kuat dan tidak mudah diguncang dengan masalah dari dalam maupun dari luar. Tanpa adanya sikap nasionalisme, persatuan negara tidak mungkin terwujud. Setiap warga negara akan merasa terusik jika ada bangsa lain yang meremehkan atau bahkan menghina bangsanya. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan memiliki peran penting dalam meningkatkan sikap nasionalisme.

Kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini memuat tentang pengamalan Pancasila, Undang- Dasar 1945 (UD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Mengingat momentum pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bersamaan dengan tahun politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, maka dapat menjadi pondasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan pilihan politik. Sebagai warga negara yang menganut system pemerintahan negara demokrasi, sepatutnya kita paham mengenai dasar-dasar ilmu politik yang sangat dibutuhkan sebagai warga negara, sebisa mungkin setiap warga negara menjadi partisipan yaitu warga negara yang paham ilmu politik serta berperan aktif didalam kehidupan politik (Fawzia & Diana, 2018).

Asal mula kata politik sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti “Negara Kota” dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan.⁷ Sedangkan filsafat politik adalah cabang filsafat yang khusus membicarakan yang bersangkutan dengan kehidupan politik, khususnya dengan hakikat, asal mula, dan nilai-nilai negara. Menurut Ikhsan Darmawan dalam bukunya *Mengenal Ilmu Politik* (2015), terdapat 3 peran warga negara dalam negara demokrasi yang pertama Partisipan, yakni warga negara yang paham mengenai ilmu politik serta berkontribusi aktif dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan politik; yang kedua subjek, yaitu warga negara yang paham mengenai ilmu politik namun kurang peduli mengenai sistem pemerintahan yang sedang berlangsung, warganya lebih tertarik terhadap hasil dari penyelenggaraannya; dan yang ketiga Parokial, yaitu warga negara yang tidak paham tentang ilmu politik dan antusias warganegara terhadap politik rendah. Hal ini ditandai dengan kurang tertariknya warga mengenai masalah politik (Darmawan, 2015).

Pancasila sebagai ideologi terbuka, Menurut Dr. Alvian, suatu ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, antara lain (1) dimensi realitas, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat, (2) dimensi idealisme yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, dan (3) dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

Konstitusi modern lahir karena dorongan akan kesadaran manusia atas kedudukan, hak dan kewajiban manusia sebagai ciptaan Tuhan dalam mengatur tatahubungan bermasyarakat dan bernegara. Para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau memberikan saham yang sangat besar bagi kelahiran konstitusi modern ini. Bersendi dari gagasan para filsuf inilah yang kemudian melahirkan konstitusi modern pertama di Amerika Serikat dan Perancis

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang dasar 1945 memuat Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan, memiliki kemiripan dengan demokrasi. Namun dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang

berkembang di Negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat. (Hamidi, 2012).

Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai: (1) inklusif, tidak bersifat eksklusif, (2) terbuka, (3) ko-eksistensi damai dan kebersamaan, (4) kesetaraan, (5) tidak merasa yang paling benar, (6) tolerans, (7) musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Suatu masyarakat yang tertutup atau eksklusif sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkembangan tidak mungkin menghadapi arus globalisasi yang demikian deras dan kuatnya, serta dalam menghadapi keanekaragaman budaya bangsa. Sifat terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain. Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945. (Budiarjo, 2019).

Menurut C.F. Strong mendefinisikan negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. (Hadjon, 2008)

Tujuan dilakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemahaman Pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perangkat desa untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

METODE

Tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan problematika yang dialami oleh sasaran pengabdian masyarakat adalah melakukan observasi terlebih dahulu kepada organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali, sebagai wadah yang menaungi para perangkat desa. Kemudian membentuk kelompok diskusi diantara perangkat desa tersebut. Selanjutnya membangun komunikasi dengan fasilitator acara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Anggota Komisi VII DPR RI Bapak Muhammad Hatta dan perlibatan pemateri dari perguruan tinggi Universitas Slamet Riyadi Bapak Farco Siswiyanto Raharjo. Kemudian terdapat tim dari Universitas Slamet Riyadi yakni Bapak Rizka Wirawan dan Agung Yudhistira Nugroho.

Diskusi awal sebelum berlangsungnya kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dilakukan oleh perangkat desa dengan membahas dinamika yang ada dimasing masing desa. Selanjutnya itu sesi paparan materi sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Kemudian dilanjutkan pada sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan keleluasaan untuk menyampaikan segala problematika terkait dengan kemajemukan yang ada dimasyarakat desa. Terutama pada waktu bersamaan dengan pemilihan umum kepala daerah yang berpotensi memunculkan ketegangan politik ditengah masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk membekali perangkat desa dan meningkatkan partisipasi politik bagi perangkat desa. Materi 4 pilar kebangsaan memiliki muatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dilaksanakan kepada organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali dengan di ikuti sejumlah 150 perwakilan perangkat desa se Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini difasilitasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Bapak Muhammad Hatta yang merupakan Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 pukul 19.00 WIB di Rumah Makan Bebek Bumbu Hitam Artomoro, Boyolali.



Gambar 1: Penyampaian Materi oleh Farco Siswiyanto Raharjo (Dosen Universitas Slamet Riyadi)

Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan juga Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR R). Pemateri menyampaikan peran 4 Pilar Kebangsaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pemerintahan desa. Selain itu sebagai jawaban dalam meningkatkan kerukunan antar masyarakat desa yang memiliki kemajemukan diberbagai aspek, seperti aspek agama, latar belakang profesi, budaya, adat dan kemajemukan lainnya.



Gambar 2 : Anggota DPR RI Komisi VII Bapak Muhammad Hatta dalam memberikan Pemaparan materi Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan.

Kegiatan diawali dengan ramah tamah antar perangkat desa se kabupaten boyolali yang hadir dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sambutan ketua pelaksana, penyampaian Biodata Pembicara oleh Moderator, paparan materi pertama dan materi kedua, sesi tanya jawab, penyampaian closing statement, pembacaan notulensi dan usulan, kemudian penutupan acara.

Fokus materi pada penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi. Ketika pemerintah desa menerbitkan peraturan desa atau merumuskan keputusan kepala desa, menjadikan otonomi daerah sebagai bagian dari tatakelola pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya melibatkan masyarakat desa sebagai bagian dari pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika di tengah kehidupan desa. Memperkuat gotong royong sebagai asas dalam pelaksanaan aktivitas pemerintah desa, Melibatkan partisipasi politik kepada masyarakat desa dalam pemilihan umum termasuk musyawarah pemilihan ketua RT, Ketua RW maupun Ketua Keagamaan seperti takmir masjid. Sebagai wujud pelaksanaan keragaman maka perlu membuat paguyuban kerukunan antar umat beragama yang diinisiasi oleh perangkat desa.

Melaksanakan penggunaan dana desa yang bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur akan tetapi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (umkm). Kepala desa melakukan kegiatan interaksi dan tanya jawab kepada Komisi VII DPR RI supaya secara politik dapat mengusulkan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pendampingan secara intensif.

Perangkat desa dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan tersebut menyatakan komitmennya untuk menjaga kerukunan antar masyarakat desa. Selain itu meningkatkan kegiatan gotong royong yang berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan antaralain bersih desa, kirab budaya, pemilihan umum ketua RT dan RW sebagai partisipasi politik. Kemudian juga mensosialisasikan pemilihan umum kepala daerah kepada masyarakat, hal ini untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya.

KESIMPULAN

Partisipasi politik menjadi sebuah keharusan dalam sistem demokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik adalah melakukan Pendidikan politik. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan menjadi salah satu upaya dalam melaksanakan Pendidikan partisipasi politik. Salah satu yang menjadi sasaran ialah perangkat desa di Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di inisiasi oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali melalui Anggota DPR RI Komisi VII yakni Bapak Muhammad Hatta. Kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan memuat materi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2019. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, Ikhsan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Kompas.
- Hadjon, Philipus. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, dkk. 2012. Teori Hukum Tata Negara – A Turning Point Of The State, Jakarta : Salemba Humanika
- Suseno, Frans Magnis. Etika Politik. PT Gramedia Pustaka: Jakarta.